

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2015-2018**

RINGKASAN SKRIPSI



ORDELIA RESTI PARAMITA

1117 29949

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
FEBRUARI 2021**

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018

Dipersiapkan dan disusun oleh:

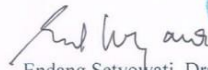
ORDELIA RESTI PARAMITA

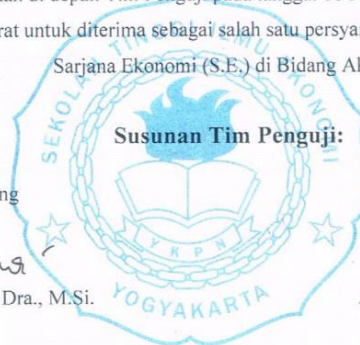
No Induk Mahasiswa: 111729949

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing


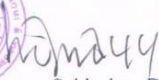

Endang Setyowati, Dra., M.Si.



Penguji


Algifari, Drs., M.Si.

Yogyakarta, 16 Februari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, sehingga menghasilkan data sekunder berupa laporan realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 yang telah dipublikasikan oleh situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *cluster sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel ditentukan berdasarkan kabupaten di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Kesimpulan yang diperoleh pada pengujian ini bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence of Regional Native Income, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Human Development Index in central Java province in 2015-2018. Data retrieval techniques using documentation techniques, resulting in secondary data in the form of a realisation report on the Regional Budget (APBD) and a report on the Human Development Index (HDI) in the districts / cities of Central Java province in 2015-2018 that has been published by the official website of the Directorate General of Financial Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS) Indonesia. Sampling techniques using cluster sampling method with considerations that are in accordance with the purpose of research. Samples were determined by district in Central Java province in 2015-2018. The conclusion obtained in this test that the Regional Native Income positively affects the Human Development Index, the General Allocation Fund negatively affects the Human Development Index, the Special Allocation Fund has no effect on the Human Development Index.

Keywords: Regional Native Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Human Development Index.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau-pulau yang tersebar dengan jumlah yang cukup banyak. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah yang melimpah. Hal ini tentunya dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju apabila sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan sumber daya manusianya berkualitas. Akan tetapi hingga saat ini Indonesia masih berkedudukan sebagai negara berkembang karena kurang maksimalnya dalam mengolah sumber daya alam dan tersedianya sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Tiap-tiap negara termasuk Indonesia memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki caranya masing-masing dalam upaya menyejahterakan masyarakat pada daerahnya sendiri. Pemerintah telah mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dapat dicapai berdasarkan beberapa elemen dasar kualitas hidup manusia. Selain itu IPM juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memastikan apakah suatu negara dapat digolongkan sebagai negara maju, negara berkembang, atau bahkan negara terbelakang.

Semua provinsi di Indonesia termasuk provinsi Jawa Tengah merasakan langsung dampak dari diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini dapat terlihat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

komponen berupa penerimaan daerah dan belanja daerah. Adanya otonomi daerah dimaksudkan agar anggaran belanja daerah dapat dialokasikan berdasarkan prioritas dan sesuai dengan kebutuhan pos masing-masing yang nantinya berdampak pada peningkatan pembangunan daerah dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014).

Proporsi belanja daerah harus mampu dialokasikan dengan baik oleh pemerintah daerah sesuai prioritasnya agar kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dapat terlaksana. Apabila program yang telah direncanakan dapat terealisasi, maka peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Setyowati dan Suparwati 2012).

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Otonomi daerah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999 dengan tujuan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan negara dapat menjadi lebih mudah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah otonom untuk menangani urusan pemerintahannya sendiri serta mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut (Siregar, 2017). Otonomi daerah diterapkan dalam kerangka NKRI berdasarkan azas desentralisasi, dimana daerah otonom melakukan kegiatan pemerintahan yang diserahkan dari pemerintah pusat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu daerah sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diharapkan. Melalui IPM, suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju, negara berkembang, maupun negara terbelakang. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM diukur dengan tiga dimensi dasar diantaranya:

1. Dimensi Pengetahuan

Pengetahuan dihitung dengan ukuran proyeksi lama sekolah, dan angka melek huruf. Angka melek huruf memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 0, artinya masyarakat tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan pemerintah menetapkan standar maksimal sebesar 100, artinya masyarakat memiliki akses yang sangat mudah untuk memperoleh pendidikan. Semakin tinggi standar angka melek huruf yang dimiliki seseorang maka seseorang akan dinilai memiliki kemampuan lebih untuk mengerti, mengidentifikasi, menerjemahkan, mengomunikasikan, serta mengolah isi dari sebuah teks yang relevan dengan berbagai situasi yang berbeda.

2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, indikator yang digunakan ialah angka harapan hidup. Sesuai dengan standar *United Nations Development Program* (UNDP) bahwa angka terendah dalam AHH di Indonesia termasuk provinsi Jawa Tengah yaitu 25 tahun dan angka tertinggi dalam AHH yaitu 85 tahun.

3. Dimensi Standar Hidup yang Layak

Standar hidup yang layak dapat diukur melalui pengeluaran per kapita. Standar hidup yang layak dapat digunakan untuk menentukan kualitas kesejahteraan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai akibat dari perekonomian yang semakin maju. Dalam hal ini, UNDP menegaskan bahwa Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan dapat digunakan untuk mengukur standar hidup yang layak. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tahun 2019 pengeluaran per kapita disesuaikan tiap individu di provinsi Jawa Tengah mencapai Rp11.102.000,-/tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang proses pemungutannya didasarkan atas peraturan daerah yang berlaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD dapat berasal dari (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari APBN dan pengalokasiannya digunakan untuk melaksanakan desentralisasi dengan membiayai suatu daerah agar terwujudnya kemampuan keuangan yang merata antara daerah satu dan lainnya. Dana Alokasi Umum (DAU) digolongkan sebagai transfer tanpa syarat (*block grant*) yang artinya bentuk transfer ini tidak terkait dengan program belanja manapun, dan pengelolaannya diserahkan kepada daerah sesuai kebutuhan daerah dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menetapkan proporsi DAU paling sedikit sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang berasal dari APBN, dan diberikan untuk tiap daerah dalam rangka membiayai kebutuhan khusus sesuai kepentingan daerah serta sesuai prioritas nasional dengan tetap mengacu pada tersedianya dana yang ada pada APBN (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Dalam hal ini, karena DAK merupakan belanja modal yang digunakan guna mendanai investasi dalam perolehan dan perbaikan serta pembangunan fasilitas publik yang mempunyai umur ekonomis panjang, maka DAK disebut sebagai dana infrastruktur (Novarianti, 2016).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang sumbernya dapat berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil persahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dalam hal ini dana yang telah dibayarkan oleh masyarakat untuk kepentingan pajak maupun retribusi daerah, nantinya akan dinikmati kembali. Retribusi daerah merupakan biaya yang dikembalikan kepada pemerintah karena pemerintah telah mencukupi keinginan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik yang meningkat. Sehingga apabila kualitas pelayanan publik meningkat, maka angka IPM diharapkan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Hasan, Mudrika.A, Agung, 2015).

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

DAU yang tergolong dalam transfer tak bersyarat (*block grant*) digunakan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah, serta diharapkan dana yang ada dialokasikan guna membiayai keperluan daerah sebagai penunjang kegiatan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tercipta kesejahteraan masyarakat (Sarkoro & Zulfikar 2018). Adanya peningkatan DAU, mengakibatkan adanya perkembangan suatu daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka akan sejalan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah tersebut.

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

DAK disebut sebagai dana infrastruktur karena pengalokasiannya digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam menunjang fasilitas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu dapat diasumsikan apabila DAK meningkat, maka kebutuhan fasilitas penunjang masyarakat juga meningkat. Pelayanan masyarakat yang mengalami peningkatan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga diharapkan IPM juga akan meningkat.

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang diterbitkan oleh sumber tertentu yang bersifat siap pakai. Penelitian ini menggunakan *time series* dari tahun 2015-2018 dan *cross section* pada semua kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs www.bps.go.id dan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran APBD (www.kemenkeu.go.id). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Olahan Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
PAD	152.044.596.332,00	1.821.274.103.250,00	346.093.679.281,90	237.142.663.504,00
DAU	400.176.755.000,00	1.398.539.653.000,00	943.803.340.238,90	244.314.114.560,40
DAK	3.750.100.000,00	483.813.446.054,00	228.767.738.098,00	126.298.939.041,00
IPM	63,18	82,72	70,92	4,50

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel PAD memiliki nilai minimum Rp152.044.596.332,00 berada di Kota Pekalongan tahun 2015, nilai maksimum Rp1.821.274.103.250,00 di Kota Semarang tahun 2018, nilai rata-rata Rp346.093.679.281,90, dan standar deviasi Rp237.142.663.504,00.

Variabel DAU memiliki nilai minimum Rp400.176.755.000,00 di Kota Salatiga tahun 2015, nilai maksimum Rp1.398.539.653.000,00 di Kabupaten Banyumas tahun 2016, nilai rata-rata Rp943.803.340.238,90, dan standar deviasi Rp244.314.114.560,40.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel DAK memiliki nilai minimum Rp3.750.100.000,00 di Kota Surakarta tahun 2015, nilai maksimum Rp483.813.446.054,00 di Kabupaten Cilacap tahun 2016, nilai rata-rata Rp228.767.738.098,00, dan standar deviasi Rp126.298.939.041,00.

Variabel IPM memiliki nilai minimum 63,18% di Kabupaten Brebes tahun 2015, nilai maksimum 82,72% di Kota Semarang tahun 2018, nilai rata-rata 70,92%, dan standar deviasi 4,50%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

N	140
Kolmogorov-Smirnov Z	0,772
Asymp. Sig (2-tailed)	0,591

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa *Asymp. Sig (2-tailed)* menunjukkan angka 0,591 > tingkat signifikansi 0,05. Dalam hal ini menunjukkan bahwa data yang telah diolah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Simpulan
PAD	0,810	1,235	Tidak ada multikolinearitas
DAU	0,518	1,931	Tidak ada multikolinearitas
DAK	0,606	1,649	Tidak ada multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas nilai *tolerance* variabel PAD, DAU, dan DAK masing-masing sebesar 0,810, 0,518, dan 0,606 yang artinya lebih besar dari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

0,10. Sedangkan nilai VIF ketiga variabel kuang dari 10, yaitu PAD 1,235, DAU 1,931, dan DAK 1,649. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki multikolinearitas karena nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Glejser

Variabel	Nilai Sig.	Simpulan
PAD	0,817	Tidak terdapat heteroskedastisitas
DAU	0,160	Tidak terdapat heteroskedastisitas
DAK	0,317	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi masing-masing PAD 0,817, DAU 0,160, dan DAK 0,317 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Durbin Watson

N	140
DW	2,1678
dL	1,6804
dU	1,7678
4-dL	2,3196
4-dU	2,2322
Simpulan	Tidak ada autokorelasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengandung autokorelasi, karena nilai dU 1,7678 lebih kecil dari nilai DW 2,1678 dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4-dU 2,2322 ($dU < DW < 4-dU$).

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Estimasi Koefisien Regresi Berganda

Variabel	Coefficients	Std. Error
Constant	2,477	0,144
LnPAD	0,110	0,010
LnDAU	-0,155	0,016
LnDAK	-0,003	0,005

Berdasarkan tabel di atas, persamaan linear regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$\ln IPM = 2,477 + 0,110 \ln PAD - 0,155 \ln DAU - 0,003 \ln DAK + e$$

Berdasarkan persamaan linear regresi berganda, berikut hasil interpretasi model regresi tersebut:

1. Pengujian terhadap parameter penaksir PAD

Tanda koefisien Ln PAD sebesar 0,110 artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan sebesar 0,110%.

2. Pengujian terhadap parameter penaksir DAU

Tanda koefisien Ln DAU sebesar -0,155 artinya jika Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan sebesar 0,155%.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pengujian terhadap parameter penaksir DAK

Tanda koefisien Ln DAK sebesar -0,003 artinya jika Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan sebesar 0,003%.

2. Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficients	T hitung	T tabel	Sig.
PAD	0,110	10,855	1,978	0,000
DAU	-0,155	-9,993	1,978	0,000
DAK	-0,003	-0,611	1,978	0,542

Berdasarkan tabel di atas, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung $10,855 > t$ tabel $1,978$ serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sesuai dengan hipotesis pertama yaitu PAD berpengaruh positif terhadap (IPM) di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018, maka hipotesis terdukung. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan t hitung bertanda negatif dengan nilai absolut $9,993 > t$ tabel $1,978$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sesuai dengan tabel di atas, maka hipotesis kedua yaitu DAU berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 tidak terdukung. Dalam hal ini menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan t hitung bertanda negatif dengan nilai absolut $0,611 < t$ tabel $1,978$ serta nilai signifikansi $0,542 > 0,05$. Sesuai dengan tabel di atas, maka hipotesis ketiga yaitu DAK berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 tidak terdukung. Dalam hal ini menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

F	57,023
Sig.	0,000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $57,023$ lebih besar dari F tabel sebesar $2,67$. Artinya variabel independen (PAD, DAU, DAK) secara bersamaan mampu menjelaskan variabel dependen (IPM).

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

N	Multiple R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
140	0,746	0,557	0,547	0,1809

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai R Square sebesar $0,557$ atau $55,7\%$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen (IPM) mampu dijelaskan oleh variabel independen (PAD, DAU, DAK) sebesar $55,7\%$,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sedangkan sisanya 44,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah itu sendiri dan memiliki tujuan untuk membiayai daerah tersebut dengan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Semakin besar PAD yang didapatkan yang berasal dari beberapa sumber, maka daerah tersebut dapat dikatakan telah mandiri dalam mengelola sumber daya yang tersedia melalui pengalokasian pada belanja modal. Oleh karenanya, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi pengalokasian belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, sehingga akan menghasilkan angka IPM yang semakin meningkat. Penelitian ini didukung oleh penelitian Lugastoro (2013) bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hasil pengujian dengan nilai t hitung $10,855 > t$ tabel $1,978$ serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama terdukung.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meminimalkan kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mewujudkan stabilitas perekonomian di suatu daerah maupun negara guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini terlihat bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap IPM, artinya DAU yang diperoleh suatu daerah lebih difokuskan pada anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan pembiayaan dan perbaikan fasilitas publik. Hal ini dapat terjadi karena unsur utama DAU didominasi oleh alokasi dasar, yaitu anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Selain itu, proporsi DAU yang diterima tiap daerah juga berbeda. Penelitian ini didukung oleh penelitian Lugastoro (2013) dan penelitian oleh Fadhly (2013) yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif terhadap IPM.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hasil pengujian dengan nilai t hitung yang bertanda negatif dan memiliki nilai absolut $9,993 > t$ tabel $1,978$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis tidak terdukung.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus sesuai kepentingan daerah dan sesuai prioritas nasional dengan tetap mengacu pada tersedianya dana

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang ada pada APBN, sehingga besaran DAK yang diterima tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK seharusnya mampu dialokasikan untuk belanja modal guna mendanai investasi dalam perolehan maupun perbaikan pembangunan fasilitas publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pada penelitian ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2014). Besaran DAK yang tidak menentu setiap tahunnya dan harus dialokasikan ke beberapa bidang mejadi salah satu faktor yang menyebabkan DAK tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Selain itu, alokasi DAU yang difokuskan pada belanja pegawai mengakibatkan alokasi DAK sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kualitas pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hasil pengujian dengan nilai t hitung yang bertanda negatif dan memiliki nilai absolut $0,611 < t \text{ tabel } 1,978$ dengan nilai signifikansi $0,542 > 0,05$, sehingga hipotesis yang menyatakan DAK berpengaruh positif terhadap IPM tidak terdukung.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Melalui uji parsial (uji t) terlihat t hitung $10,855 > t \text{ tabel } 1,978$ serta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PAD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya IPM. Daerah yang mampu menghasilkan PAD yang semakin tinggi, maka daerah tersebut akan semakin mandiri dalam kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada melalui pengalokasian belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kualitas layanan publik.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Hal ini dibuktikan melalui uji parsial (uji t) yang menunjukkan t hitung bertanda negatif dengan nilai absolut $9,993 > t$ tabel $1,978$ serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian, DAU belum sepenuhnya mampu meningkatkan IPM karena unsur utama DAU didominasi oleh anggaran dasar yang digunakan untuk belanja pegawai. Meskipun IPM dapat dipengaruhi oleh belanja pegawai, akan tetapi kontribusi yang diberikan DAU untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat relatif kecil.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Hal ini dibuktikan melalui uji parsial (uji t) yang menunjukkan t hitung bertanda negatif dengan nilai absolut $0,611 < t$ tabel $1,978$ serta nilai signifikansi $0,542 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian, DAK sulit untuk mempengaruhi IPM karena besaran DAK yang tidak menentu setiap tahunnya serta pengalokasian DAK yang tersebar ke beberapa bidang yang mengarah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada kegiatan investasi dan membutuhkan jangka waktu cukup panjang untuk melihat pengaruhnya.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran diantaranya:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Tengah sudah baik dalam mengelola PAD sehingga daerah tersebut sudah dapat dikatakan mandiri. Pengalokasian DAU serta DAK lebih diperhatikan agar kegiatan pembangunan suatu daerah menjadi berkembang, sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggunakan sampel yang berbeda agar mampu mengetahui perkembangan suatu daerah termasuk juga penduduknya yang mencakup provinsi di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah maupun menggunakan variabel yang berbeda agar memperoleh hasil yang berbeda serta akurat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Pendapatan, P., Daerah, A., Dana, D. A. N., Kadek, N., & Wijayanti, H. (2013). *PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah t. 1164–1193.*
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1)*, 54–63. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1972>
- Zul Fadhly. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat, 1(1)*, 1–15.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya, 2015-2017. <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik: UPP STIM
- Hirawan. 2007. Hirawan, Susiyati Bambang. (2007). *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

-----‘ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta

-----‘ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah*. Departemen Komunikasi
dan Informatika. Jakarta

Sekretariat Negara. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial*.

Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang
dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas
Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya.

Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, DAU, DAK, PAD, dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan
Kota se-Jawa Tengah). Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Putra, Putu Gede Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877.

Harahap, Riva Ubar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Fauzyny, Wulan. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Lugastoro, Decta Pitron. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

Damayanti, Meutia Irma. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Rachmawati, Laila. 2016. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN), Yogyakarta.

UNDP, BPS dan Bappenas 2004. *Laporan Pembangunan Manusia 2004: Ekonomi dari demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*, BPS-Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Hasan, Mudrika.A, Agung, Mu. F. . (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 190–203.